Jurnal Sejarah Indonesia
ISSN Print (2621-1580), ISSN Online (3032-4564)
Volume 9 Nomor 2 2026
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsi

Dari NIROM ke RRI: Radio sebagai Instrumen Kekuasaan dan Media Perjuangan Nasional di Indonesia, 1928–1945

Nur Faida Lailaturrohmah

Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Email: nurfaidalailaturrohamah@students.unnes.ac.id

*Korespondensi

Received: 33-04-2026, Revised: 28-10-2026, Accepted: 03-11-2026, Published: 30-11-2026

Abstrak

Gerakan nasionalisme anti-kolonial semakin mencuat pasca terbentuknya Budi Utomo tahun 1908, yang kemudian disusul Kongres Pemuda I tahun 1926 dan Kongres Pemuda II tahun 1928. Di masa yang sama, radio yang sedang populer dijadikan senjata oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai instrumen kekuasaan, melalui NIROM (*Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij*). Berawal dari NIROM, eksistensi radio sebagai media alat kontrol kekuasaan terus berlanjut di masa pendudukan Jepang, dengan nama *Hoso Kanri Kyoku*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tranformasi radio di masa penjajahan hingga kemerdekaan Indonesia, dari tahun 1928 -1945. Melalui metode penelitian sejarah dengan empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa radio mengalami pergerseran fungsi, dari alat propaganda kolonial menjadi medium perjuangan nasional dan intergrasi sosial masyarakat selama masa penjajahan dan perjuangan kemerdekaan, Dalam sejarah Indonesia, radio bukan hanya sekedar media informasi dan komunikasi, tetapi juga berperan dalam pembentukan identitas nasional dan cikal bakal lahirnya RRI.

Kata Kunci: Kekuasaan; NIROM; Perjuangan Nasional; Radio; RRI

Abstract

Anti-colonial nationalist movements increasingly gained momentum following the establishment of Budi Utomo in 1908, which was later followed by the First Youth Congress in 1926 and the Second Youth Congress in 1928. During the same period, radio, which was gaining popularity, was utilized by the Dutch colonial government as an instrument of power through NIROM (*Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij*), and this role as a medium of political control continued during the Japanese occupation under the name *Hoso Kanri Kyoku*. This study aims to analyze the transformation of radio from the colonial period to Indonesian independence between 1928 and 1945 using the historical research method, which consists of four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results of this research indicate that radio underwent a shift in function from a colonial propaganda tool to a medium of national struggle and social integration during the period of colonialism and the struggle for independence; in Indonesian history, radio was not merely a medium of information and communication, but also played a significant role in the formation of national identity and became a precursor to the establishment of Radio Republik Indonesia (RRI).

Keywords: NIROM; National Struggle; Power; Radio; RRI

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Perkembangan era digital yang semakin pesat membuat banyak perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, terutama pada askes informasi dan teknologi. Pola konsumsi media masyarakat yang mengalami perubahan, dengan munculnya smartphone, laptop, dan televisi, yang menyajikan konten dengan tampilan visual media lebih menarik. Tak berhenti sampai disitu, Lahirnya platform digital, seperti Youtube, TikTok, Instagram, dan Facebook juga memberikan pilihan yang lebih variatif bagi para pengguna smartphone. Disisi lain, radio sebagai salah satu bentuk dari teknologi komunikasi dan informasi, mengalami penurunan persentase pendengar. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional (BPS, 2025), persentase penduduk yang mendengarkan radio, mengalami penurunan dari 13,3% pada tahun 2018, menjadi hanya 9% di tahun 2024. Secara tidak langsung, radio mau tidak mau harus dapat melakukan inovasi, agar dapat tetap eksis di tengah masifnya perkembangan media komunikasi dan informasi digital. Oleh karena itu, radio saat ini mulai merambah pada perkembangan teknologi siaran radio digital (DAB/HD Radio) yang memiliki kualitas suara yang lebih jernih dengan banyak pilihan saluran dalam satu frekuensi (Matius, 2025). Namun, dibalik eksistensi radio yang semakin meredup di Indonesia, radio pernah memiliki peran utama dalam kehidupan sosial dan pergerakan nasional Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.

Dalam sejarahnya, perkembangan radio diawali dengan ditemukannya teori elektromagnetik yang dikembangkan oleh J.C Maxwell, yang kemudian dibuktikan Heinrich Hertz pada tahun 1887 dengan berhasil mengirim dan menerima gelombang radio. Upaya ini kemudian dilanjutkan Guglielmo Marconi, yang mengembangkan sistem telegrafi tanpa kabel dan berhasil melewati Samudra Atlantik pada tahun 1901 melalui gelombang elektromagnetik. Sementara itu, stasiun radio komersial pertama kali, berawal dari garasi rumah seorang ahli teknik bernama Frank Conrad, di daerah Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 1919, yang kemudian berubah menjadi KDKA dan mulai beroperasi pada tanggal 2 November 1920 (Kustiawan et al., 2022). Pada abad ke-20 radio menjadi media informasi dan komunikasi dunia yang memiliki peran utama dalam menyajikan beragam hiburan dan berita. Radio berkembang secara masif, terutama di kawasan Amerika Serikat dan Eropa terutama Inggris, dengan berdirinya siaran radio terkenal seperti BBC (1923), NBC (1962) dan CBS (1927) yang kemudian diikuti oleh beberapa negara lainya, tak terkecuali Belanda serta negeri jajahannya (Zamroni, 2009).

Lahirnya radio di Indonesia, berawal saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda yang merupakan negeri jajahan Belanda. Pada tahun 1923 di kawasan Pegunungan Malabar, diresmikan Stasiun Radio Malabar oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jenderal Dirk Fock. Stasiun radio ini menghubungkan jalinan komunikasi jarak jauh antara Belanda dan Hindia Belanda sepanjang 12.000 km (Sakinah et al., 2023). Stasiun Radio Malabar akhirnya menjadi titik munculnya komunikasi radio di Hindia Belanda seperti BRV (Batavian Radio Vereeniging) milik

swasta dan NIROM (Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij). NIROM sendiri merupakan radio resmi yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1928 di Amsterdam, namun pada pelaksanaannya NIROM baru mulai beroperasi pada 1 April 1934 bertepatan dengan penetapan Radiowet, sebagai undang-undang terkait radio.

Pada dasarnya NIROM bukan hanya sekedar radio biasa, NIROM pada masa Hindia Belanda merupakan alat yang memiliki tujuan sebagai alat instrumen kekuasaan dan sarana propaganda dalam menentang kaum pergerakan nasional yang menjadi ancaman bagi kekuasaan kolonial. Namun, tidak hanya terbatas pada isu politik, nirom juga merupakan alat hiburan bagi para pendengar non-Eropa, seperti peranakan China dan para kaum pribumi melalui siaran program "ketimuran" berbahasa lokal yang menyiarkan acara mulai dari musik, berita, hingga budaya lokal (Teofani et al., 2025). Pada akhirnya NIROM tidak hanya menjadi radio yang eksis di masa Hindia Belanda tetapi juga bergulir hingga masa pendudukan Jepang dengan nama Hoso Kanri Kyoku, dan berakhir menjadi milik pemerintah Indonesia secara resmi pada pasca kemerdekaan dengan nama RRI (Radio Republik Indonesia) pada tanggal 11 September 1945.

Sebelumnya, sejumlah penelitian terkait NIROM telah dilakukan, seperti mengenai peran NIROM sebagai media propaganda politik sekaligus budaya dan hiburan melalui program ketimuran yang terfokus di masa Hindia Belanda, namun berakhir menjadi paradoks "senjata makan tuan" (Teofani et al., 2025). Selain itu, penelitian selanjutnya membahas terkait sejarah perkembangan terbentuknya RRI (Radio Republik Indonesia) sejak zaman kolonial Belanda hingga kemerdekaan (Neliawati, 2024). Ada juga penelitian Yuliati (2012) tentang mewaspadai propaganda melalui sistem propaganda Jepang di Jawa 1942–1945. Namun beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya tidak ada yang terfokus pada dampak pergerakan nasional dan kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat. Segala perkembangan peran NIROM, dari radio kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, hingga menjadi milik pemerintah Indonesia tidak terlepas pada peran sosial dan pergerakan yang masyarakat Indonesia lakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait perubahan keadaan sosial dan pergerakan nasional melalui corong radio, dari lahir NIROM hingga berganti nama menjadi RRI, dengan rentan batas temporal tahun 1928-1945.

Metode

Dalam kajian penelitian sejarah ini, penulis menggunakan metode penelitian berbasis historis dalam melakukan pendekatan sistematis guna mengumpulkan, menguji, dan menafsirkan bukti-bukti masa lalu, agar dapat merekonstruksi sebuah peristiwa. Dengan empat langkah utama yang terdiri dari Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2018). Tahapan awal, yaitu heuristik berupa proses yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data serta sumber-sumber sejarah terkait penelitian yang telah ditentukan. Penulis disini menggunakan sumber primer dari dokumen-dokumen seperti koran Belanda, arsip foto, dan data arsip pemerintah. Sementara untuk sumber sekunder diambil dari artikel jurnal, buku, dan skripsi, yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Selanjutnya tahap kedua, berupa kritik sumber yang merupakan langkah lanjutan untuk memproses, menguji, memeriksa data dan sumber terkait agar

mendapatkan data yang dapat diuji kredibilitasnya. Tahap ketiga merupakan interpretasi, yang berguna untuk melakukan analisis dan perbandingan untuk dapat menafsirkan hubungan antara suatu fakta dengan fakta lainnya. Terakhir adalah tahapan historiografi yang ditujukan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu sesuai dengan penelitian yang ditetapkan penulis, sehingga melahirkan penulisan sejarah yang sistematis dan kronologis. Melalui tahapan metode penelitian ini penulis menyajikan bentuk penelitian sejarah yang naratif dan analitis dalam mengkaji tentang bagaimana peran NIROM, sebagai radio yang mempengaruhi dan membentuk kehidupan sosial masyarakat secara langsung, maupun tidak langsung, dalam tempo sejak masa awal berdiri di masa kolonial, yang kemudian mengalami perpindahan tangan saat pendudukan Jepang, dan berakhir menjadi milik Indonesia pasca kemerdekaan, yang menjadi cikal bakal RRI (Radio Nasional Indonesia). Satu-satunya radio nasional milik pemerintah Indonesia yang tetap bertahan hingga kini di tengah era perkembangan yang semakin modern.

Hasil dan Pembahasan

Lahirnya NIROM dan Awal Pemanfaatan Radio oleh Belanda

Dampak politik etis secara tidak langsung melahirkan kesadaran akan persatuan dan rasa nasionalisme dari para pemuda bangsa untuk lebih memperjuangkan kemerdekaan. Pasca 1908, ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo yang menjadi tonggak dalam lahirnya pergerakan nasional Indonesia, yang kemudian disusul oleh organisasi-organisasi lainya. Berjalannya Kongres Pemuda I pada tahun 1926 dan Kongres Pemuda II tahun 1928, juga semakin menyulut api semangat nasionalisme anti-kolonial. pada tahun 1930-1942 pergerakan nasional mengalami transisi menjadi fase yang lebih moderat, hal ini terjadi karena tindakan represif pemerintah Belanda dalam di tengah menguatnya arus nasionalisme. Beberapa Tindakan yang dilakukan adalah membubarkan organisasi-organisasi radikal yang dianggap mengancam keamanan pemerintah Belanda di tanah Hindia Belanda sejalan dengan law and order yang termuat di pertauran koninklijk besluit 1 September 1919 (Wahyuni & Mursal, 2022). Selain itu, melalui hak Istimewa *Exorbitante Rechten*, pemerintah kolonial Belanda dapat melakukan penangkapan dan pengasingan tanpa proses pengadilan kepada para tokoh pergerakan yang dianggap berbahaya seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Burhanuddin, dan Sutan Syahrir (Poesponegoro, 2008).

Di lain sisi, selain melakukan berbagai regulasi pada pembatasan pergerakan nasional di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda juga melakukan upaya lain dengan mendirikan media informasi dan komunikasi radio di Hindia Belanda. Selain pendirian Stasiun Radio Malabar, Belanda melalui PHOHI (Philips Omroep Holland-Indië) sebuah stasiun radio di Belanda yang didirikan tahun 1927, dan berfokus pada koloni-koloni Belanda, menyusun sebuah rencana untuk daerah koloni Hindia Belanda. Rencana PHOHI di Hindia Belanda bermaksud untuk menghadirkan pengaruh Belanda yang lebih kuat melalui radio, karena jumlah orang eropa yang hanya berjumlah 0,4% dari total seluruh populasi Hindia Belanda. Diharapkan dengan berdirinya sebuah stasiun radio milik pemerintah Belanda dapat menjadi penyeimbang terhadap otoritasnya yang perlahan melemah (Kaan, 2017). Hal ini juga sangat berkaitan erat dengan konteks politik yang terjadi pada tahun 1930-

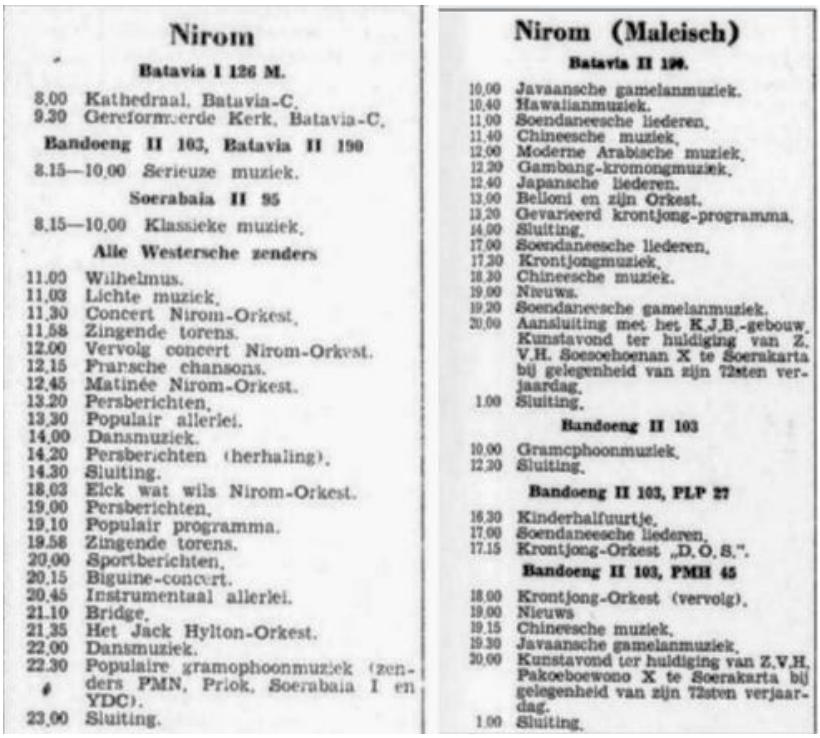
1945 di mana bangkitnya nasionalisme anti-kolonial pasca 1908 dan 1928 (Kuitenbrouwer, 2019).

Oleh karena itu, PHOHI mulai melakukan kerjasama dengan perusahaan komersial, yaitu Indische PTT (Post, Telegraaf, dan Telefoon) kerjasama ini bertujuan untuk melakukan perluasan pembentukan stasiun nirkabel di Hindia Belanda. Dari kerjasama ini Pada bulan Desember 1928, NIROM (Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij) mulai didirikan dengan dana sebesar 375.000 guilder (Kuitenbrouwer, 2019). Namun konsesi penyiaran NIROM baru disetujui oleh Volksraad ada tahun 1930, setelah konsesi disetujui butuh beberapa tahun sebelum memulai siaran reguler, karena harus menginvestasikan banyak uang serta waktu untuk membangun taman antena agar memastikan jangkauan siarannya ke seluruh pulau (Kuitenbrouwer, 2019). Pengoprasian NIROM secara resmi di Hindia Belanda yang dimulai pada 1934, dan memiliki cakupan wilayah operasi siaran di seluruh pulau jawa, dengan cabang-cabang yang berdiri di kota-kota besar seperti Batavia, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Sebelum NIROM lahir, telah terdapat beberapa radio yang telah berkembang di Hindia Belanda diantaranya, yaitu Bataviaasch Radio Vereniging (BRV) tahun 1925, miliki oleh swasta, Scosche Radio Veregning (SRV) tahun 1933, milik pribumi yang didirikan oleh KGPAA Mangkunegara VII, dan Mataram Sche Vereeniging voor Radio Omroep (MAVRO) tahun 1934 yang didirikan atas bantuan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII (Puspitadewi, 2006).

Munculnya berbagai stasiun radio tersebut, mendorong pemerintah Kolonial Belanda untuk menerbitkan undang-undang yang berkaitan tentang radio, yang disebut Radiowet. Penerbitan Radiowet ejalan dengan diresmikanya radio NIROM pada tahun 1934. Radiowet merupakan alat kontrol politik atas media penyiaran radio yang disahkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, sebagai undang-undang yang bertujuan dalam membatasi, mengontrol, serta mengatur siaran radio yang beroperasi di wilayah Hindia Belanda. Adanya peraturan ini secara tidak langsung menjadikan NIROM sebagai radio yang mendominasi penyiaran di wilayah Hindia Belanda, terutama Jawa. selain itu, dibandingkan radio lainya, NIROM memiliki keistimewaan, yaitu memiliki hak prioritas lebih terkait penerimaan iuran pendengar (luister bijdrage) yang ditetapkan sebesar ƒ 1,50 per bulan pada tahun 1938 bagi para pendengar radio, sesuai dengan keputusan Direktur Transportasi, Pekerjaan Umum, dan Pengelolaan Air ("DE OMROEPBIJDRAGE DE NIROM," 1937). hal ini juga merupakan tujuan dari para kolonial Belanda untuk dapat mencari keuntungan finansial dan memperkuat posisi sebagai penjajah di Hindia Belanda.

Pada awal mula mengudara di tanggal 31 Maret 1934 , NIROM menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa komunikasi siaran. Seiring berjalannya waktu, perkembangan radio lokal semakin yang berkembang, membuat NIROM ingin memperluas jangkauan bagi para pendengar. Selain itu, pertimbangan akan pengaturan bagi para pendengar di wilayah timur yang mendapati diri mereka diharuskan membayar biaya lisensi radio kepada NIROM, terlepas dari apakah mereka ingin mendengarkan programnya atau tidak (Kaan, 2017). Oleh karena itu, NIROM, perusahaan tersebut secara hukum wajib mempertimbangkan preferensi berbagai kelompok "pendengar timur" di samping keinginan "pendengar barat". Pada tahun 1935, NIROM mulai memperluas jaringannya dengan program-program "ketimuran" yang berbahasa melayu maupun daerah, walaupun begitu dalam

pelaksanaannya program siaran 'barat' dan 'timur' disiarkan pada frekuensi berbeda, dengan maksud agar keduanya dapat disiarkan secara bersamaan tanpa saling mengganggu (Kuitenbrouwer, 2019).



Nirom

Batavia I 126 M.

8.00 Kathedraal, Batavia-C.
9.30 Gereformeerde Kerk, Batavia-C.

Bandoeng II 103, Batavia II 190

8.15—10.00 Serieuze muziek.

Soerabaia II 95

8.15—10.00 Klassieke muziek.

Alle Westersche zenders

11.00 Wilhelmus.
11.03 Lichte muziek.
11.30 Concert Nirom-Orkest.
11.58 Zingende torens.
12.00 Vervolg concert Nirom-Orkest.
12.15 Fransche chansons.
12.45 Matinée Nirom-Orkest.
13.20 Persberichten.
13.30 Populair allerlei.
14.00 Dansmuziek.
14.20 Persberichten (herhaling).
14.30 Sluiting.
18.03 Elck wat wils Nirom-Orkest.
19.00 Persberichten.
19.10 Populair programma.
19.58 Zingende torens.
20.00 Sportberichten.
20.15 Biguine-concert.
20.45 Instrumentaal allerlei.
21.10 Bridge.
21.35 Het Jack Hylton-Orkest.
22.00 Dansmuziek.
22.30 Populaire gramophoonmuziek (zenders PMN, Priok, Soerabaia I en YDC).
23.00 Sluiting.

Nirom (Maleisch)

Batavia II 190.

10.00 Javaansche gamelanmuziek.
10.40 Hawaiianmuziek.
11.00 Soendaneesche liederen.
11.40 Chineesche muziek.
12.00 Moderne Arabische muziek.
12.20 Gambang-kromongmuziek.
12.40 Japansche liederen.
13.00 Belloni en zijn Orkest.
13.20 Gevarieerd krontjong-programma.
14.00 Sluiting.
17.00 Soendaneesche liederen.
17.20 Krontjongmuziek.
18.30 Chineesche muziek.
19.00 Nieuws.
19.20 Soendaneesche gamelanmuziek.
20.00 Aansluiting met het K.J.B.-gebouw. Kunstavond ter huldiging van Z. V.H. Soesoehoenan X te Soerakarta bij gelegenheid van zijn 72sten verjaardag.
1.00 Sluiting.

Bandoeng II 103

10.00 Gramophoonmuziek.
12.30 Sluiting.

Bandoeng II 103, PLP 27

16.30 Kinderhalfuurtje.
17.00 Soendaneesche liederen.
17.15 Krontjong-Orkest „D.O.S.".

Bandoeng II 103, PMH 45

18.00 Krontjong-Orkest (vervolg).
19.00 Nieuws
19.15 Chineesche muziek.
19.30 Javaansche gamelanmuziek.
20.00 Kunstavond ter huldiging van Z.V.H. Pakoeboewono X te Soerakarta bij gelegenheid van zijn 72sten verjaardag.
1.00 Sluiting.

Gambar 1. Perbedaan Program antara Siaran Barat dan Timur (maleisch) di Radio NIROM
Sumber: Bataviaasch nieuwsblad, 10 Oktober 1936

Lahirnya radio “ketimuran” ini, memberikan warna baru bagi program radio NIROM, yang berisi tentang konten kebudayaan seperti musik Arab, musik Tionghoa, musik tradisional, cerita legenda, hingga politik dan kehidupan sehari-hari. Dalam memberikan program “ketimuran” Ini NIROM melakukanya dengan dua pendekatan, yaitu memberikan subsidi keuangan kepada SRV dan radio-radio timur lainnya untuk menyiarkan program-program timur mereka. Kedua, karena memiliki dana yang cukup untuk memproduksi program-program timurnya sendiri dengan mengundang kelompok-kelompok seni dan budaya lokal (Darmanto et al., 2022). Namun, di tahun 1936 NIROM mulai mengumumkan untuk menghasilkan siaran “ketimuran” secara mandiri, hal secara tidak langsung berdampak penguasan NIROM yang mendominasi, sehingga terkesan seperti monopoli. Dampak ini membuat para radio-radio lokal mengalami marginalisasi, sehingga akhirnya muncul inisiasi akan pembentukan PPRK (Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran) yang berdiri pada 28 Maret 1937, sebagai wadah perjuangan radio-radio timur (lokal) dalam menghadapi tekanan radio milik pemerintah Belanda, NIROM.

Terbentuknya PPRK dipimpin oleh Sutardjo Hadikusumo yang merupakan seorang anggota Volksraad. Perjuangan membentuk asosiasi PPRK, akhirnya

berhasil mendapatkan lobi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda agar dapat mengontrol siaran ketimuran. Pada tahun 1940 NIROM resmi menyerahkan siaran-siaran ketimuran kepada PPRK, hal ini sejalan dengan surat dari sekretaris pemerintah pada tanggal 30 Juli 1940, tentang persetujuan gubernur dalam mentransfer komposisi dan produksi program Penyiaran Umum Timur ke PPRK, program PPRK pertama kali akan disiarkan pada tanggal 1 November 1940 ("De Oostersche Omroep en de P.P.R.K," 1940). Adanya siaran radio ketimuran dan asosiasi PPRK bukan hanya sekedar bentuk media informasi dan komunikasi biasa, tetapi bentuk perlawanan terhadap budaya barat, sebuah embrio dari semangat nasionalisme Indonesia. Intervensi budaya Eropa yang dibawa oleh Belanda di Indonesia pada waktu itu dianggap terlalu kuat dan dapat mengesampingkan budaya dan seni asli Indonesia. Dalam menghadapi tantangan tersebut, para pemuda dan penggerak bangsa melakukan pendekatan budaya melalui penyiaran radio, kecintaan terhadap budaya lokal menjadi dasar bagi masyarakat untuk menjadi diri mereka sendiri dan menolak intervensi budaya yang dibawa oleh Belanda (Dewantara, 1994).

Pada tahun 1942 ketua PPRK diberitahukan atas permintaanya, melalui surat dari Jaksa Agung tertanggal 8 Januari 1942 no. 167 'A/P', tentang persetujuan pemerintah dalam pemutusan kata "Indonesia" yang boleh digunakan tanpa batasan pada siaran radio, lagu dan lain sebagainya ("Het gebruik van het woord Indonesia," 1942). Radio ketimuran ini memberikan dampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat asli Indonesia, dalam melawan para penjajah. Karena penjajahan bukan hanya pada perebutan wilayah atau sumber daya alam , tetapi juga kebudayaan dan pola pikir. PPRK menjadi penyambung pendengaran dan pikiran rakyat Indonesia dalam mempertahankan jati diri bangsa, ditengah penjajahan bangsa asing. Hingga akhirnya Belanda menyerah pada Jepang,melalui penandatangan perjanjian antara pihak Belanda dan Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat, pada tanggal 8 Maret 1942. Secara de facto Indonesia resmi beralih tangan ke Jepang, dan menjadi tanda berakhirnya penjajahan Belanda dan eksistensi NIROM di Indonesia.

Analisis dan interpretasi tambahan

Dari sudut pandang sejarah media, pembentukan NIROM tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai inovasi teknologi penyiaran. Radio merupakan infrastruktur yang memerlukan modal, pengaturan frekuensi, jaringan pemancar, dan izin operasi. Karena itu, pihak yang menguasai sarana teknis memiliki keunggulan dalam menentukan siapa yang boleh berbicara, bahasa yang digunakan, serta kelompok pendengar yang diprioritaskan. Kuitenbrouwer (2019) menunjukkan bahwa otoritas kolonial memiliki pandangan ambivalen terhadap penyiaran: radio diharapkan memperkuat ikatan imperial, tetapi sekaligus membuka peluang bagi arus komunikasi yang sukar sepenuhnya dikendalikan. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa perluasan siaran NIROM berjalan beriringan dengan pengaturan ketat terhadap radio lokal. Dengan demikian, modernisasi komunikasi kolonial menghasilkan kontradiksi internal antara perluasan khalayak dan pembatasan otonomi komunikasi masyarakat jajahan.

Pemisahan siaran Barat dan Timur juga perlu dipahami sebagai praktik kategorisasi sosial, bukan hanya keputusan teknis. Pembagian tersebut mencerminkan cara administrasi kolonial membayangkan pendengar sebagai kelompok-kelompok berbeda menurut bahasa, selera budaya, dan posisi sosial.

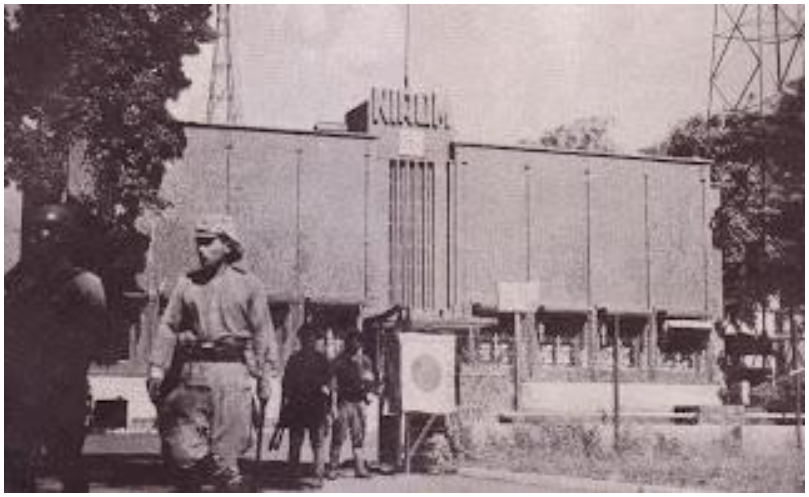
Akan tetapi, batas itu tidak selalu sejalan dengan pengalaman nyata pendengar yang dapat menikmati musik, berita, dan pertunjukan lintas kategori. Kajian Takonai (2006) terhadap majalah Soeara NIROM memperlihatkan bahwa program radio turut membentuk sirkulasi musik dan selera budaya di Hindia Belanda. Dengan membaca daftar acara dan pengumuman siaran sebagai sumber sejarah, peneliti dapat mengidentifikasi jenis musik yang memperoleh ruang, jam tayang yang disediakan, dan bagaimana kebudayaan lokal dikemas untuk pendengar yang semakin luas. Namun, daftar program tidak otomatis membuktikan jumlah pendengar maupun penerimaan mereka terhadap isi siaran.

Kontestasi NIROM dengan perkumpulan radio ketimuran menegaskan bahwa nasionalisme budaya tidak selalu muncul melalui pidato politik yang eksplisit. Tuntutan untuk mengelola acara sendiri, menentukan pilihan bahasa, dan menampilkan kesenian setempat dapat dipahami sebagai perebutan kewenangan representasi. Dalam konteks ini, PPRK merupakan arena negosiasi tentang siapa yang berhak mendefinisikan budaya yang layak didengar oleh publik. Pengalihan pengelolaan siaran ketimuran pada 1940, sebagaimana disebut dalam sumber surat kabar yang dikutip naskah, penting dianalisis sebagai perubahan tata kelola, bukan langsung disamakan dengan kemerdekaan editorial penuh. Perlu diperiksa apakah kewenangan atas isi acara, pendanaan, jadwal, dan pemancar benar-benar beralih secara setara. Pembedaan antara produksi isi dan kepemilikan infrastruktur membuat analisis hubungan kolonialisme dan radio menjadi lebih tepat.

Keberadaan iklan, iuran pendengar, dan subsidi juga memperlihatkan dimensi ekonomi politik penyiaran. Ketika pendapatan dan hak distribusi tidak seimbang, perkumpulan lokal berpotensi bergantung pada institusi yang lebih kuat. Ketergantungan finansial dapat memengaruhi kapasitas produksi sekalipun tidak selalu disertai larangan politik yang eksplisit. Oleh sebab itu, narasi tentang monopoli NIROM sebaiknya ditopang oleh perbandingan dokumen konsesi, laporan keuangan, aturan iuran, dan jadwal program. Naskah telah menyediakan petunjuk berupa berita mengenai iuran dan pemindahan produksi acara, tetapi bukti tersebut masih perlu dihubungkan secara sistematis. Pendekatan ini menghindarkan kesimpulan bahwa semua program ketimuran bersifat antikolonial; sebagian mungkin merupakan hiburan komersial, sementara sebagian lain membuka ruang ekspresi identitas yang lebih otonom.

Sentralisasi Penyiaran Radio di Bawah Pendudukan Jepang (1942–1945)

Sebelum Jepang menguasai Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda melakukan penghancuran di beberapa pemancar, khususnya pemancar yang dimiliki oleh stasiun radio swasta yang tergabung dalam PPRK. Pemerintah Hindia Belanda khawatir pemancar-pemancar tersebut akan digunakan oleh Jepang, sedangkan pemancar-pemancar yang dikelola oleh radio Pemerintah Hindia Belanda, seperti BRV (Bataviasche Radio Vereniging) dan NIROM tetap beroperasi hingga disita oleh Jepang pada tahun 1942 (Ningsih, 2017).



Gambar 2. Bekas Radio NIROM Dijaga Ketat Oleh Tentara Jepang
Sumber: https://Indonesia-zaman-doeloe.blogspot.com/2013/01/pasukan-Jepang-mengambil-alih-stasiun.html

Ketika Jepang resmi menduduki Indonesia, tidak hanya kekuasaan yang dikontrol tetapi juga media komunikasi dan informasi. PPRK dibubarkan dan NIROM, radio resmi milik pemerintah kolonial Belanda beralih tangan menjadi milik Jepang dan berubah nama menjadi Hoso Kanri Kyoku (radio kantor pusat di Jakarta) dan Hoso Kyoku (stasiun radio daerah). Jepang menyadari bahwa media tertulis seperti surat kabar, buku, majalah, dan pamflet, mungkin memiliki pengaruh terbatas terhadap penduduk kota yang berpendidikan, tetapi sama sekali tidak berguna di masyarakat pedesaan (Kurasawa, 1987). Oleh karena itu, untuk memperluas pengaruh radio dipilih yang tidak hanya sekedar alat media biasa, radio digunakan sebagai alat propaganda yang memainkan peran penting dalam memobilisasi dan memotivasi rakyat. Upaya untuk mengontrol ketat radio, digunakan menghindari propaganda dan siaran dari negara-negara sekutu. Secara umum, selama Perang Dunia II radio digunakan sebagai media untuk menyebarkan informasi dan propaganda untuk memenangkan perang (Budiarto et al., 2024).

Hoso Kanri Kyoku, merupakan kantor pusat radio propanganda Jepang di Jakarta, dan berperan mengontrol keseluruhan cabang-cabang radio Jepang lainya, yang disebut Hoso Kyoku di beberapa daerah di Indonesia. Dalam enam bulan pertama pendudukan Jepang, Hoso Kanri Kyoku menyiarkan program dalam bahasa Belanda, Inggris, Prancis, dan Arab. Beberapa warga Indonesia di jadikan pekerja dalam lembaga radio ini, seperti Herawati Diah, Surjodipuro, Budiman, Ch. Tambu, Bachtiar Lubis, dan BM Diah, mereka diberi kesempatan untuk membuat program radio berbahasa Indonesia (Ningsih, 2017). Selain itu, beberapa orang Belanda seperti Ritman dan Zierman seorang jurnalis di masa kolonial Belanda juga dipekerjakan untuk membuat program berbahasa inggris (Kementrian Penerangan Indoensia, 1953). Di akhir tahun 1942, Jepang merubah kebijakan peraturan siaran radio dengan melarang penggunaan bahasa asing, terutama Belanda, sehingga siaran hanya menggunakan bahasa Indonesia dan Jepang sebagai bahasa resmi (Djamalul Abidin As, 1985). Adapun program broadcast bahasa inggris tetap

digunakan sebagai alat untuk menyiarkan berita tentang kemenangan Jepang selama perang dan kehidupan sehari-hari para tawanan perang di kamp-kamp Jepang.

Radio pada masa Jepang, menjadi salah satu alat krusial dalam menyebarkan budaya Jepang dan alat informasi militer mengenai Perang Asia timur raya, yang menjadi tujuan utama Jepang untuk menguasai asia di perang dunia II. Melalui Hōsō Kanri kyoku, pembatasan media radio pada masa pemerintahan Jepang jauh lebih ketat dibandingkan masa pemerintahan kolonial Belanda. Jepang melakukan sentraliasi penyiaran radio secara ketat, banyak radio swasta milik para penduduk asli Indonesia tidak diperbolehkan beroperasi, hanya radio dibawah kendali pemerintahan Jepang yang dapat melakukan siaran secara legal. Tidak hanya itu, penggunaan radio hanya boleh menggunakan Radio Oemoem. seluruh radio-radio yang dimiliki oleh rakyat disegel, tidak boleh digunakan. Rakyat hanya diperbolehkan mendengarkan Radio Oemoem, yang dipasang di tempat-tempat umum strategis. Penggunaan radio ini, bertujuan agar rakyat hanya mendengarkan berita dan siaran yang telah disaring oleh pemerintah Jepang yang disesuaikan dengan tujuan dan keinginan mereka.

Namun ditengah keterbatasan yang ada, budaya lokal Indonesia tetap terjaga. Jepang yang dihadapkan pada heterogenitas dan kompleksitas bahasa dalam masyarakat Jawa, segera menyadari bahwa penduduk Jawa tidak selalu menguasai bahasa Indonesia dengan baik, di daerah pedalaman dan pedesaan penguasaan bahasa masih sangat terbatas. Bahasa Jawa dan Sunda adalah media komunikasi sehari-hari mereka. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatan propaganda mereka, Jepang harus menerjemahkan kembali pesan-pesan mereka dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah (Kurasawa, 1987). Maka dari itu, dalam siaran radio, masih ada program musik tradisional, seni tradisional (wayang dan ketoprak), dan berita dalam bahasa daerah.

Melalui media radio Hoso Kanri Kyoku dan Kanri Kyoku yang digunakan untuk menyebarkan propaganda kepada rakyat Indonesia, justru lebih berpengaruh dalam membentuk kesadaran nasional dan rasa nasionalisme yang lebih kuat dari pada tujuan propaganda yang telah direncanakan Jepang. Seperti siaran pidato Soekarno yang awalnya bertujuan sebagai alat propaganda dalam menentang imperialisme barat dan membentuk perasaan senasib sebagai saudara Asia, justru berbalik membentuk semangat kemerdekaan. Siaran lagu-lagu patriotik, seperti Rayuan Pulau Kelapa, Bisikan Tanah Air, Indonesia Tanah Pusaka, oleh Ismail Marzuki, membentuk rasa cinta tanah air, sebelum akhirnya dicurigai oleh kepala propaganda Jepang (Ningsih, 2017).

Ditengah kontrol dan siasat propaganda Jepang yang masif. Rakyat Indonesia masih tetap bertahan dalam budaya lokal mereka, menjunjung jiwa nasionalisme, dan mengekspresikan diri dengan cara sendiri dengan melakukan operasi gerakan bawah tanah. Memantau perkembangan situasi dunia luar (luar negeri) melalui radio ilegal. Di tengah-tengah pembatasan dan peraturan radio yang ketat ini, para penggerak bangsa dan rakyat Indonesia justru saling bahu membahu melawan penjajahan tidak hanya melalui perang dan organisasi, tetapi melawan dominasi dalam kehidupan sehari-hari yang mereka Jalani, dengan jiwa-raga yang sama-sama ingin Merdeka.

Cita-cita kemerdekaan Indonesia mulai terlihat nyata, berita kekalahan Jepang pada tahun 1945 disiarkan melalui stasiun radio asing, seperti BBC London. Berita tersebut disebarkan oleh para pemimpin pergerakan Indonesia secara diam-diam dan cepat, mereka menggunakan pemancar radio ilegal yang berhasil disembunyikan dari otoritas para penjajah Jepang. Rencana kemerdekaan mulai disusun sedemikian rupa, para golongan muda membujuk para golongan tua agar segera meresmikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari pertemuan sembunyi-sembunyi di Rengasdengklok hingga pembacaan proklamasi di kediaman Ir. Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta Pusat, bendera merah putih mengudara, lagu Indonesia raya merdu bersuara, tanda Indonesia merdeka. terjadinya kemerdekaan sekaligus menjadi tanda dari akhir eksistensi Hoso Kanri Kyoku dan Hoso Kyoku.

Peran Radio dalam Kemerdekaan dan Pembentukan RRI

Pasca-proklamasi kemerdekaan dan pembentukan RRI pada 11 September 1945, pertempuran di udara tidak berhenti. Pemerintah Belanda melancarkan siaran radio dari Belanda ke Indonesia selama perang dekolonisasi (1945–1949) untuk memelihara pengaruh politik dan mempertahankan komunikasi di antara kalangan warga serta tentara Belanda (Kuitenbrouwer, 2022).

Peran Radio membawa makna besar bagi awal kemerdekaan Indonesia, ditandai melalui pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno di rumah kediamannya. Setelah pembacaan proklamasi selesai dilakukan, beberapa pemuda Indonesia langsung berusaha menyerahkan teks proklamasi untuk disiarkan di gedung siaran radio Hoso Kanri Kyoku yang ada di Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Namun, usaha ini gagal para pemuda karena dihalangi oleh para kempetai (polisi rahasia militer Jepang) yang berjaga ketat. Akhirnya, seorang wartawan dari berita DOMEI sjahrudhin, melalui tembok belakang gedung siaran berhasil memberikan teks proklamasi kepada para pemuda Indonesia yang bekerja di dalam radio Hoso Kanri Kyoku.

Pada jam 19:00 WIB, tanggal 17 Agustus, Muhammad Yusuf Ronodipuro, Bachtiar Lubis dan Suprapto menggunakan siaran luar negeri yang ditutup oleh pihak Jepang. Mereka melakukan siaran teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan disiarkan ulang bahasa Inggris agar dapat dipahami dunia internasional. Siaran itu akhirnya dapat dijangkau oleh station radio BBC London, Radio Amerika, hingga Singapura yang mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka, lalu sebarkan lagi oleh radio-radio internasional tersebut. Bocornya pengamanan siaran internasional yang telah dibatasi, diketahui oleh pihak Jepang, Yusuf dan teman-teman akhirnya ditangkap dan disiksa habis-habisan, namun berakhir dibebaskan ("RRI Dan 'Voice of Indonesia'-Nya," 1983). Siaran proklamasi ini, menjadi akhir dari penutupan pengoperasian radio Hoso Kanri Kyoku dan menjadi siaran internasional pertama RRI.

Tanggal 11 September 1945, menjadi tonggak awal lahirnya RRI (Radio Republik Indonesia) yang menandakan berakhirnya masa operasi radio kepemilikan Jepang Hoso Kanri Kyoku dan Hoso Kyoku. Diawali pada tanggal 10 September, para pemimpin radio daerah di Jawa melakukan rapat di Jakarta dan yang bertujuan membentuk "Pusat Penyiaran Radio Indonesia" yang dipimpin oleh Dr. Abdulrachman Saleh sebagai delegasi Radio, didampingi oleh Menteri Luar

Negeri Achmad Soebardjo dan Menteri Sosial Iwa Kusuma Sumantri untuk menemui Sekretaris Negara. Dari Sekretaris Negara ini, kemudian diadakan pertemuan lanjutan dengan seorang pejabat Jepang di rumah pembesar Jepang, tepat pada jam 00:00, rapat dibuka oleh Dr. Abdulrachman Saleh dan dihadiri oleh beberapa wakil-wakil pemimpin studio radio daerah ("RRI Dan 'Voice of Indonesia'-nya," 1983). Dari pertemuan tersebut RRI disepakati didirikannya RRI dengan Dr. Abdulrachman Saleh sebagai pemimpinnya. Momentum tanggal 11 September 1945 kemudian ditentukan sebagai hari lahirnya RRI (Radio Republik Indonesia) serta Hari Peringatan Radio Nasional. Akhirnya RRI secara formal menjadi alat media penerangan dalam struktur pemerintahan Indonesia.

Analisis Dinamika Penyiaran Pasca 1945

Selain perjuangan fisik di lapangan, periode perang dekolonisasi (1945–1949) juga diwarnai kontestasi siaran radio antara RRI sebagai corong perjuangan Republik Indonesia dan stasiun penyiaran Belanda yang berupaya menjangkau komunitas Belanda di Indonesia (Kuitenbrouwer, 2022).

Pergantian kekuasaan pada 1942 memperlihatkan kesinambungan dan perubahan dalam sejarah penyiaran. Kesinambungannya terletak pada pentingnya jaringan pemancar, tenaga teknis, dan kebiasaan mendengarkan radio yang telah berkembang pada masa kolonial Belanda. Perubahannya tampak pada intensitas sentralisasi dan tujuan mobilisasi perang. Kurasawa (1987) menjelaskan bahwa pemerintah pendudukan Jepang menggunakan beragam media visual dan auditif untuk menjangkau penduduk Jawa, terutama kelompok yang tidak terlayani secara efektif oleh media cetak. Dengan demikian, radio harus ditempatkan di dalam ekosistem propaganda yang juga meliputi pertunjukan, musik, film, poster, dan pidato. Dampak pesan siaran tidak dapat dipisahkan dari pengulangan tema serupa melalui medium-medium tersebut.

Pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah pada masa pendudukan mengandung dua sisi yang perlu dianalisis bersamaan. Di satu sisi, kebijakan komunikasi ditujukan untuk memudahkan penyampaian pesan penguasa dan memperkuat mobilisasi masyarakat. Di sisi lain, penggunaan bahasa yang lebih dekat dengan pendengar berpotensi memperluas pengalaman komunikasi antardaerah. Akan tetapi, perluasan pemakaian bahasa Indonesia tidak serta-merta berarti Jepang bermaksud memajukan kemerdekaan Indonesia. Penafsiran yang lebih hati-hati ialah bahwa kepentingan propaganda perang dapat menghasilkan akibat sosial yang melampaui tujuan semula. Masduki (2023) menekankan pentingnya warisan model penyiaran masa pendudukan Jepang dalam sejarah radio setelah kemerdekaan. Temuan ini mendukung pembacaan bahwa organisasi, teknik, dan budaya kerja radio dapat bertahan meskipun legitimasi politik penguasanya berubah.

Analisis terhadap pendengar juga perlu membedakan akses, paparan, dan penerimaan. Radio umum yang dipasang di tempat strategis memang dapat memperluas peluang masyarakat mendengar informasi resmi. Namun, keberadaan perangkat di ruang publik belum cukup untuk memastikan bahwa semua orang memahami, mempercayai, atau menerima isi siaran. Reaksi pendengar mungkin berbeda menurut usia, pendidikan, bahasa, pengalaman perang, dan kedekatan dengan aparat. Kurasawa (1987) memperlihatkan bagaimana propaganda Jepang

dirancang berdasarkan asumsi penguasa tentang masyarakat yang menjadi sasaran. Karena itu, sumber resmi propaganda perlu dibaca secara kritis sebagai pernyataan niat penguasa, bukan cermin langsung keberhasilan propaganda. Catatan harian, kesaksian, laporan intelijen, dan arsip siaran dapat membantu menguji jarak antara rancangan program dengan pengalaman sosial.

Kisah mendengarkan radio asing secara tersembunyi juga menunjukkan bahwa kontrol informasi tidak pernah sepenuhnya identik dengan kontrol pengetahuan. Informasi dapat berpindah melalui pendengaran pribadi, percakapan, jaringan aktivis, dan penyebaran lisan. Namun, tingkat keluasan praktik ini tidak boleh dilebih-lebihkan tanpa data tentang perangkat penerima, lokasi, serta aktor yang terlibat. Dalam kerangka sejarah sosial, tindakan mendengarkan secara diam-diam lebih tepat dipahami sebagai salah satu kemungkinan praktik negosiasi kekuasaan di tengah risiko hukuman. Pembacaan ini memberi ruang bagi agensi masyarakat tanpa mengabaikan kuatnya pengawasan militer Jepang.

Dari segi metodologi, analisis sejarah penyiaran akan lebih kuat apabila setiap kelompok sumber diperlakukan sesuai karakter dan keterbatasannya. Surat kabar sezaman memberi petunjuk tentang pengumuman resmi dan perdebatan publik, tetapi pemilihan berita dipengaruhi posisi redaksi. Majalah program radio membantu merekonstruksi jadwal dan pilihan isi siaran, namun tidak merekam semua praktik mendengarkan. Peraturan kolonial menunjukkan maksud pengendalian, bukan bukti otomatis kepatuhan. Kesaksian pelaku kemerdekaan menghadirkan pengalaman yang berharga, tetapi perlu diperbandingkan karena ingatan dapat berubah seiring waktu. Dengan triangulasi sumber semacam itu, penelitian dapat membedakan perkembangan kelembagaan yang terdokumentasi dari interpretasi mengenai nasionalisme. Penggunaan istilah radio ketimuran juga perlu diberi konteks historis sebagai kategori administrasi kolonial, bukan label budaya yang bersifat alamiah atau tunggal. Perhatian terhadap ketimpangan sumber akan mencegah suara pengelola radio yang tercatat dalam arsip dianggap mewakili seluruh pendengar di Hindia Belanda. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menelaah perbedaan pengalaman antara kota yang memiliki studio dan desa yang hanya mengakses penerima bersama. Perbedaan ini penting agar pernyataan tentang jangkauan radio tidak berubah menjadi generalisasi mengenai dampak sosial yang seragam. Ketersediaan perangkat penerima, biaya langganan, waktu siaran, serta kemampuan bahasa perlu diperlakukan sebagai variabel historis yang membatasi akses masyarakat. Dengan demikian, radio dapat dinilai sebagai arena kemungkinan pembentukan identitas, tanpa mengasumsikan bahwa setiap pendengar memiliki tanggapan politik yang sama.

Kesimpulan

Radio memainkan peran strategis dalam dinamika perjuangan nasional dan pembentukan kesadaran masyarakat Indonesia sejak awal masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan. Pendirian NIROM sebagai radio resmi milik pemerintah kolonial Belanda di kawasan Hindia Belanda pada tahun 1934, menjadi media alat komunikasi dan informasi utama Belanda dalam melawan kekuatan anti kolonialisme dan memperkuat otoritas sosial-politik Belanda sebagai seorang penjajah. Seiring berjalannya waktu, NIROM melahirkan siaran “ketimuran” yang ditujukan untuk para masyarakat pribumi, yang kemudian diserahkan Belanda

kepada PPRK (Perserikatan Perkumpulan Radio Ketimuran) yang dikelola oleh para perwakilan radio-radio lokal. Melalui siaran "ketimuran" secara tidak langsung menjadi alat komunikasi dan informasi dalam mempertahankan kebudayaan lokal dan semangat perjuangan. Tahun 1942, saat Jepang beralih menguasai Indonesia, NIROM berganti nama menjadi radio *Hoso Kanri Kyoku* (radio kantor pusat) dan *Hoso Kyoku* (stasiun radio daerah), yang dikelola oleh pemerintah Jepang sebagai alat kontrol sosial dalam menyebarkan propaganda untuk mendukung kepentingan militer dan ideologi Jepang.

Namun, ditengah sentralisasi kekuasaan pemerintah Jepang yang sangat kuat, perjuangan kemerdekan tidak padam. Melalui siaran radio internasional yang disembunyikan secara diam-diam, para golongan muda berhasil mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu. Dari sini, Muncul desakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi dilakukan berita kemerdekaan disebarluaskan di radio *Hoso Kanri Kyoku*, oleh pemuda Indonesia melalui siaran kabel internasional yang dibatasi dan dijaga ketat oleh Jepang. Dari siaran radio ini, dunia internasional mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan bangsa asing. Pasca masa kemerdekaan, radio yang dulu pernah dimiliki oleh Belanda dan Jepang telah resmi menjadi milik pemerintah republik Indonesia pada 11 September 1945, dengan nama RRI (Radio Republik Indonesia). Hingga saat ini, RRI masih terus bertahan menjadi satu-satunya radio resmi milik pemerintah yang menjadi saksi sejarah, di tengah perkembangan teknologi yang terus berkembang tiada habisnya.

Referensi

BPS. (2025). *Persentase Penduduk Berumur 10 tahun ke Atas yang Mendengarkan Siaran Radio dalam Seminggu Terakhir (Persen), 2024*. Badan Pusat Statistika.

Budiarto, G., Yuliati, D., & Puguh, D. R. (2024). Japanese Military Government Policy on Radio Broadcasting in Java. *Mozaik Humaniora, 24*(1), 100–112. https://doi.org/10.20473/mozaik.v24i1.50425.

Darmanto, Masduki, & Wiryawan, H. (2022). Radio Broadcasting and Indonesian Nationalism: During the Last Decade of Dutch Colonialism. *Journal of Radio & Audio Media, 29*(1), 104–119. https://doi.org/10.1080/19376529.2022.2035730.

De Omroepbijdrage De Nirom. (1937, Maret 12). *De Indische Courant.*

De Oostersche Omroep en de P.P.R.K. (1940, Februari 8). *Soerabaijasch handelsblad*.

Dewantara, K. H. (1994). *Karya Ki Hadjar Dewantara II: Kebudayaan*, Volume 2. Majelis Luhur Tamansiswa.

Djamalul Abidin As. (1985). *40 Tahun Radio Republik Indonesia: Sekali di Udara Tetap di Udara*. Panitia Peringatan Hari Radio ke-40.

Het gebruik van het woord Indonesia. (1942, Oktober 1). *Soerabaijasch handelsblad*.

Kaan, P. (2017). Up in the air: Radio, identity and politics in the Dutch East Indies, 1927–1942 [Master's thesis, Leiden University]. Scholarly Publications Leiden University.

Kementrian Penerangan Indoensia. (1953). *Sedjarah Radio di Indonesia*. Djawatan Radio Republik Indonesia (RRI).

Kuitenbrouwer, V. (2019). The Glass House Revisited: Radio Broadcasting and the Blind Spots in the Late Colonial State in the Netherlands Indies, 1920s and 1930s. In R. Koekkoek, A.-I. Richard, & A. Weststeijn (Eds.), *The Dutch Empire between Ideas and Practice, 1600–2000* (pp. 183–204). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27516-7_9

Kuitenbrouwer, V. (2022). Dutch speaking to Dutch: Broadcasts from the Netherlands to Indonesia during the decolonization war (1945–1949). *Journal of Radio & Audio Media, 29*(1), 42–60. https://doi.org/10.1080/19376529.2021.2023538.

Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Penerbit Tiara Wacana.

Kurasawa, A. (1987). Propaganda Media on Java under the Japanese 1942-1945. *Indonesia, 44,* 59. https://doi.org/10.2307/3351221.

Masduki. (2023). The influence of Japanese colonialism on post-independence Indonesian radio. *Media History, 29*(1), 116–129. https://doi.org/10.1080/13688804.2022.2048640.

Matius, A. (2025). *Radio di Era Digital dengan Perkembangannya*. https://rri.co.id/lain-lain/1914250/radio-di-era-digital-dengan-perkembangannya.

Neliawati, I L. G. (2024). Sejarah Perkembangan Radio Republik Indonesia (RRI): History of the Development of Radio Republik Indonesia (RRI). *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial, 5*(2), 135–137. https://doi.org/10.59672/nirwasita.v5i2.3786.

Ningsih, W. F. (2017). The Forgotten Medium: Hoso Kanri Kyoku and the Beginning of National Broadcasting in Indonesia. *Lembaran Sejarah, 12*(1), 36-43. https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.25518.

Poesponegoro, M. D. (Ed.). (2008). *Zaman Kebangkitan Nasional dan masa hindia Belanda.* Balai Pustaka.

Puspitadewi, R. (2006). Aspek Hukum Penyelenggaraan Radio Siaran Swasta di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia, 24*(3), 271–291.

RRI Dan "Voice of Indonesia"-nya. (12 September1983). Berita Yudha. https://mpn.komdigi.go.id/arsip/detail/70045/sheet?q=Muhammad%20Yusuf%20Ronodipuro%20proklamasi.

Sakinah, A. H., Ulya, S., Azizah, S. Y., & Arifin, F. (2023). Radio Malabar: Dunia Radio Tersembunyi di Lembah Pegunungan Malabar, Bandung, 1916-1946. *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan, 3*(2), 95–113. https://doi.org/10.51190/jazirah.v3i2.69.

Takonai, S. (2006). Soeara NIROM and musical culture in colonial Indonesia. *Japanese Journal of Southeast Asian Studies, 44*(2), 145–203. https://doi.org/10.20495/tak.44.2_145.

Teofani, D. A. D., Puguh, D. R., & Rochwulaningsih, Y. (2025). "Perebutan Ruang Udara": Kontestasi Jaringan Radio di Bawah Pengawasan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, 1934-1942. *Jurnal Sejarah Citra Lekh, 10*(1), 67–75. https://doi.org/10.14710/jscl.v10i1.68636.

Wahyuni, B., & Mursal, I. F. (2022). Analisis masa pergerakan nasional Indonesia 1908-1942. *Siginjai: Jurnal Sejarah*, *2*(1), 54-67. https://doi.org/10.22437/js.v2i1.18742.

Kustiawan, W., Tanjung, A. S., Siregar, A. A., Rifa'i, A., & Purba, A. M. (2022). Sejarah Singkat Radio, Format, Perangkat Siaran, Revolusi Serta Keunggulan dan Kelemahannya. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi*, *2*(3), 85-90. https://doi.org/10.55606/juitik.v2i3.350.

Yanty, D. L. (2025). Tantangan dan Peluang Penyiaran Radio Di Era Digitalisasi : Studi Kasus Pada RRI Purwokerto. *MIJI: Merdeka Indonesia Journal International,* *5*(1), 38–45. https://merdekaindonesia.com/index.php/MerdekaIndonesiaJournalInternati/article/view/318.

Yuliati, D. (2012). Mewaspadai propaganda melalui kajian sejarah (Studi atas sistem propaganda Jepang di Jawa 1942–1945). *Humanika, 15*(9). https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/3993.

Zamroni, M. (2009). Perkembangan Teknologi Komunikasi dan dampaknya terhadap kehidupan. *Jurnal Dakwah, 10*(2), 195–211. https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/2009.10205.